KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Jurnal Kehumasan

DINAMIKA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2021

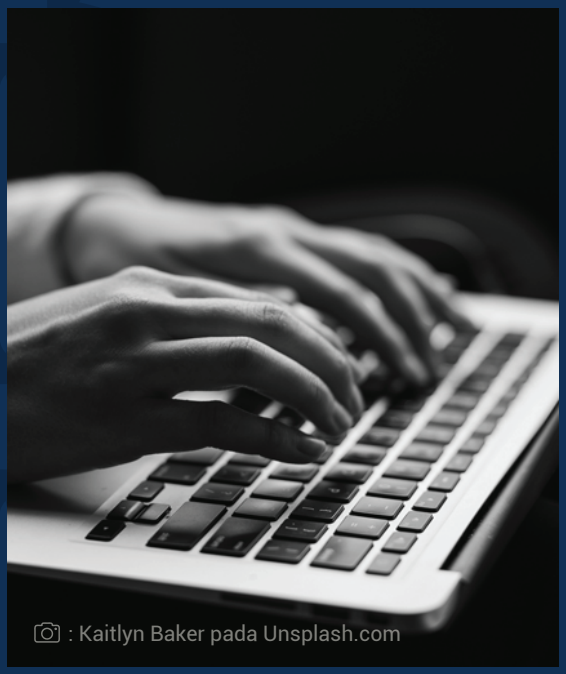
: Kaitlyn Baker pada Unsplash.com

Penanggung Jawab:
Setya Utama

Pengarah:
Eddy Cahyono Sugiharto

Pimpinan Redaksi:
Faisal Fahmi

Redaktur dan Kontributor:
Akhmad Firmannamal
Oky Tri Handoko
Khairunnisaa

Desain Grafis:
Wulan Nawangsari
Novanda Prayogatama

Sekretariat:
Guspita Rani

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii
BAB 1 - IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	**1**
1. Dasar Hukum	2
2. Pengelolaan Informasi Publik	5
3. Akses Informasi dan Pelayanan Publik	7
4. Ringkasan Akses Informasi	11
5. Daftar Informasi Publik	12
6. Anugerah Keterbukaan Informasi	13
BAB 2 - KERJASAMA KEHUMASAN	**14**
1. Forum Tematik Bakohumas	15
2. Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas	16
3. PTPN III	17
4. Rapat Koordinasi PPID	18
5. FGD dengan BRI	19
6. Kunjungan Virtual PKM UNISBA	20
7. Kunjungan Kehumasan LAN	22
8. Media Visit, Fajar Cirebon	22
9. Rapat Koordinasi PPID dengan UGM	23
10. Konvensi Nasional Pranata Humas 2021	24
11. Webinar Kehumasan "Strategi Komunikasi Publik: Akselerasi Penyampaian Pesan Efektif Di Tengah Pandemi"	25
12. Audiensi dengan IPRAHUMAS	27
13. Audiensi dengan PERHUMAS Muda Jakarta Raya	28
14. Monitor dan Evaluasi KIP	29
15. Kunjungan Virtual dengan FISIP UNTIDAR	30
16. Webinar Kehumasan dengan PERHUMAS Muda Jakarta Raya	31
17. Media Visit, Batam	32
18. Kolaborasi Kehumasan, ITDC Nusa Dua	33
19. Kolaborasi Kehumasan, PT. TWC dan BOB	34
20. Kolaborasi Kehumasan, ITDC Mandalika	35

DAFTAR ISI

BAB 3 - KOMUNIKASI PUBLIK DAN DISEMINASI INFORMASI **36**

UNJUK RASA 37

1. Cabut Omnibus Law 42

2. May Day 43

3. Hari Lingkungan Hidup 44

4. Pekerja Tembakau 45

5. Reuni 212 46

DISEMINASI INFORMASI **47**

Kinerja Website dan Media Sosial 48

SURVEI KEPUASAN PENERIMAAN KUNJUNGAN DELEGASI MASYARAKAT 50

: Kementerian Sekretariat Negara

KATA PENGANTAR

Perjalanan Bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip demokrasi yang telah mengakar dalam nadi orang-orang Indonesia. Di dalam demokrasi, rakyat diberi kedaulatan penuh dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang dicanangkan oleh pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menjadi sebuah ruh dan nyawa bagi penyelenggaraan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, sehingga setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan serta didasari dengan keinginan luhur untuk menyejahterakan rakyat, terlebih lagi dengan mengedepankan keinginan masyarakat.

Di titik inilah, hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diimplementasikan. Kebebasan menyeluruh dan

bertanggung jawab kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya atas segala dinamika yang terjadi menjadi keistimewaan tersendiri dari prinsip demokrasi.

Para pendiri Bangsa Indonesia pun telah meletakkan hak setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada masyarakat di dalam konstitusi negara pada Pasal 28E UUD 1945 "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Melalui pasal inilah, semangat untuk berkolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik diletakkan. Dengan kata lain, pemerintah perlu mendengar suara masyarakat untuk membentuk sebuah kebijakan yang solutif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Kementerian Sekretariat Negara sebagai sebuah institusi yang bertugas untuk memberikan pelayanan teknis, analisis, dan administratif kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara wajib berperan aktif dalam menghimpun aspirasi publik melalui proses komunikasi publik yang efektif dan efisien. Nantinya, aspirasi masyarakat yang dihimpun dapat menjadi pertimbangan bagi terciptanya peraturan dan kebijakan publik yang dapat memberikan dampak positif seluas-luasnya bagi masyarakat dan setiap permasalahan yang disampaikannya.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan langkah-langkah komunikasi publik yang aktif dan efektif yaitu mediasi aksi unjuk rasa dan penerimaan delegasi masyarakat. Dua jenis komunikasi publik ini menjadi cara-cara paling efektif untuk menampung aspirasi masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara serta menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan demi menciptakan proses edukasi masyarakat mengenai proses pemerintahan yang efektif dan efisien.

BAB 1

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

: Rendy Novantino pada Unsplash.com

DASAR HUKUM

: Kementerian Sekretariat Negara

1 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara perlu mengelola informasi dan dokumentasi yang transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, memiliki kepastian, akuntabel, dan profesional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

2. Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang telah disesuaikan dengan perubahan struktur dan kebutuhan organisasi dan tata kerja Kementerian.

3. Keputusan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka rangka meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara, telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

4. Standar Pelayanan dan *Standard Operating Procedures* Pemberian Informasi Publik Kepada Masyarakat yang Berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai badan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, perlu dilakukan kegiatan pemberian informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien, maka ditetapkan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Kepada Masyarakat yang Berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan 8 (delapan) standar pelayanan prosedur (SOP):

a. SOP Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui pengumuman.
b. SOP Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui penanganan permohonan.

c. SOP Pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara.
d. SOP Penanganan snegketa informasi yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui ajudikasi dan mediasi.
e. SOP Penyusunan dan penetapan daftar informasi publik (DIP).
f. SOP Pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi publik yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara.
g. SOP Pendokumentasian informasi publik .
h. SOP Pendokumentasian informasi publik yang dikecualikan

5. Maklumat Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Maklumat pelayanan PPID Kementerian Sekretariat Negara merupakan pernyataan tertulis yang memuat keseluruhan kewajiban dan janji PPID Kementerian Sekretariat Negara yang terdapat dalam standar pelayanan menyangkut pelayanan informasi kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPID Kementerian Sekretariat Negara menyatakan maklumat pelayanan sebagai berikut:

> "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara secara responsif, akurat, santun, dan akuntabel"

: Kementerian Sekretariat Negara

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

.

Upaya Kemensetneg untuk mengintegrasikan sistem dan data informasi publik sehingga pelayanan yang dilakukan dapat bertransformasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

Struktur Organisasi PPID

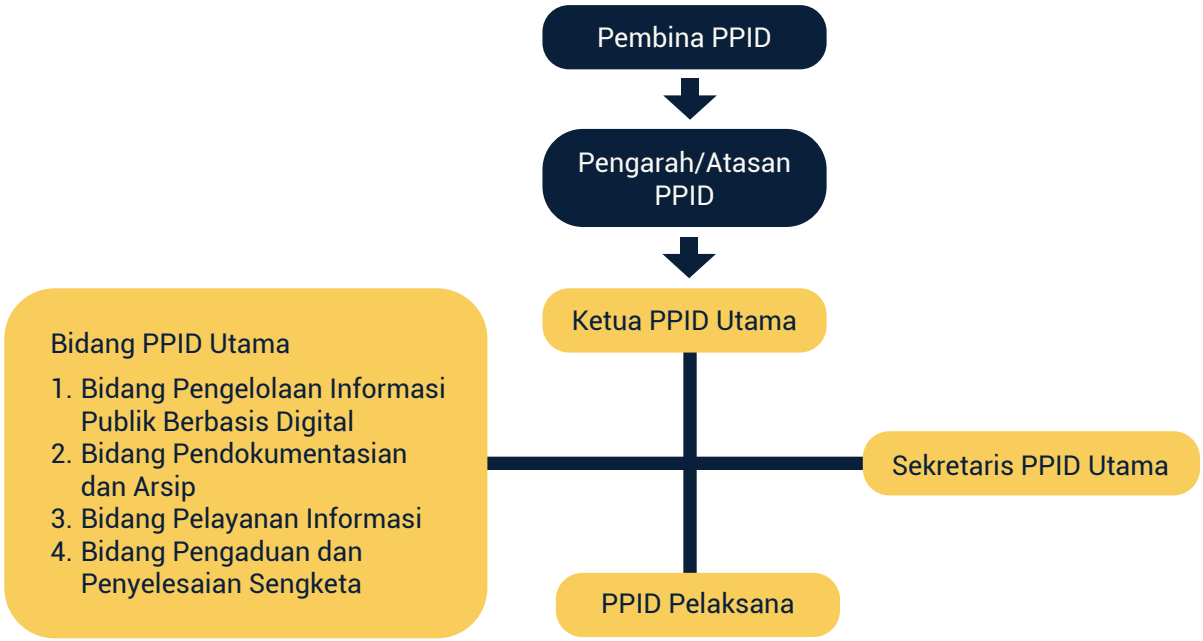

- Kepmensesneg Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Penetapan PPID di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
- Kepmensesneg Selaku Pengarah/Atasan PPID Kemensetneg Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Penetapan PPID Pelaksana di Lingkungan Kemensetneg

AKSES INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik yang dibutuhkan, salah satunya adalah dengan menyediakan pelayanan satu pintu melalui media sosial Kemensetneg baik Instagram, Facebook, maupun Twitter.

Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi atau pelayanan hanya dengan memindai QR Code atau mengakses tautan yang tertera.

: Humas Kemensetneg

1. Setneg Mantul

Setneg Mantul merupakan cara komunikasi baru yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara guna mendiseminasikan kerja-kerja Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara/Kementerian Sekretariat Negara.

2. Setneg Sepekan

Setneg Sepekan merupakan cara komunikasi baru yang digagas oleh Kemensetneg dalam menginformasikan kegiatan Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Sekretaris Negara/Kementerian Sekretariat Negara dalam periode satu minggu kepada publik.

3. Setneg Proaktif

Setneg Proaktif merupakan program aktual dan informatif berisi arahan/pernyataan dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara selama sepekan.

4. SPACE (Setneg Punya Cerita)

SPACE (Setneg Punya Cerita) merupakan artikel liputan yang dimuat di *website* dan media sosial Kemensetneg. SPACE berisi wawancara dengan pimpinan tinggi madya, ASN berprestasi, atau unsur SDM di lingkungan Kemensetneg, yang antara lain mengupas tentang tugas dan fungsi satuan kerja, inovasi yang telah dilakukan manajemen kepemimpinan, pembahasan ringan seputar kegiatan personal di luar kesibukan kerja, cerita inspiratif lainnya yang dapat menjadi informasi positif kepada masyarakat.

5. Setneg Real

Setneg Real merupakan konten kreatif yang dikembangkan oleh Biro Humas Kemensetneg dalam bentuk video kekinian yang mengikuti tren saat ini seperti Tiktok. Konten kekinian ini dapat menjadi sumber informasi positif kepada masyarakat.

6. Setnegpedia

Setnegpedia merupakan salah satu media penyebar informasi kepada publik yang diinisiasi oleh Biro Humas Kemensetneg. Setnegpedia menjadi konten yang berisi informasi-informasi terkini mengenai program Kemensetneg dan juga pemerintah pada umumnya, baik yang telah, sedang, maupun yang akan dilakukan.

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK

Periode tahun 2021

No	Periode Tahun 2020	Jumlah Pemohon Informasi (Lembaga/ Individu)	Jumlah Informasi yang Diminta	Jumlah Permohonan Informasi DIkabulkan	Jumlah Permohonan Informasi Ditolak	Rata-rata Waktu Penanganan Permohonan Informasi (Hari)	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik
1.	Januari	8	8	5	3	5	1. Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID BP2MI 2. Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID DPR RI 4. Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID Kemenkopolhukam 6. Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID Kemendagri 7. Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID Kemenko PMK 8. Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID Kemenesdm 9. Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID Kemendikbudristek 12. Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID ANRI
2.	Februari	4	7	6	1	4	
3.	Maret	1	2	-	2	1	
4.	April	4	7	1	6	4	
5.	Mei	-	-	-	-	-	
6.	Juni	2	2	1	1	2	
7.	Juli	3	3	2	1	3	
8.	Agustus	3	4	1	3	3	
9.	September	5	5	1	4	4	
10.	Oktober	1	1	1	-	1	
11.	November	2	2	2	-	2	
12.	Desember	6	6	4	2	6	
	Total	**39**	**47**	**24**	**23**	**32**	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

	Secara Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Jumlah
PPID Pelaksana Sekretariat Kementerian dan Kedeputian	246	142	-	258	646
PPID Pelaksana Sekretariat Presiden	62	-	-	-	62
PPID Pelaksana Sekretariat Wakil Presiden	13	-	-	-	13
PPID Pelaksana Sekretariat Militer Presiden	30	-	-	6	36
PPID Pelaksana Sekretariat Wantimpres	5	9	-	13	27
PPID Pelaksana Sekretariat KSP	27	11	-	9	47
PPID Pelaksana PPK GBK	18	-	-	-	18
PPID Pelaksana PPK Kemayoran	32	54	10	10	106
Total	**433**	**162**	**10**	**286**	**955**

4. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Selasa (26/10), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 dengan predikat “Badan Publik Informatif". Acara penganugerahan yang dilaksanakan secara virtual ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi dan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin.

Klasifikasi "Badan Publik Informatif" merupakan klasifikasi tertinggi Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021.

Sumber: Humas Kemensetneg

BAB 2

KERJASAMA KEHUMASAN

(FGD/Webinar/Rapat Koordinasi Kehumasan)

: Christina @ wocintechchat.com pada Unsplash.com

1. Webinar Forum Tematik Bakohumas

Strategi Komunikasi Publik: Akselerasi Penyampaian Pesan Efektif Di Tengah Pandemi

Rabu (3/3), Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan webinar forum tematik Bakohumas dengan tema Strategi Komunikasi Publik: Akselerasi Penyampaian Pesan Efektif Di Tengah Pandemi.

Webinar diselenggarakan dalam rangka mendiseminasikan pesan-pesan Pemerintah sebagai upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, utamanya guna membangun persepsi bahwa vaksin halal, aman, dan bermanfaat.

Sumber: Humas Kemensetneg

2. Kunjungan Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas

oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Selasa (30/3), Biro Hubungan Masyarakat menerima kunjungan peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika secara daring. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali lebih dalam mengenai ekosistem baru kehumasan pada era digital di lingkungan Kemensetneg, terutama dalam upaya mengoptimalkan layanan kehumasan agar dapat mendukung upaya transformasi menuju Humas Pemerintah yang adaptif dan lincah (*agile*).

Sumber: Humas Kemensetneg

3. Webinar bersama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III)

Peningkatan Layanan Kehumasan Kemensetneg menuju Dilan Proaktif (Digital Melayani Profesional Inovatif)

Kamis (22/4), Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyelenggarakan Webinar Series 1: memperkenalkan proyek perubahan "Peningkatan Layanan Kehumasan Kemensetneg menuju Dilan Proaktif (Digital Melayani Profesional Inovatif)". Dalam Webinar tersebut, Biro Humas menggandeng *Holding* Perkebunan Nusantara (PTPN III).

Webinar yang diadakan secara virtual, diikuti oleh peserta perwakilan dari satuan organisasi dan Badan Layanan Umum (BLU) yang dikelola Kemensetneg guna membangun *shared vision* serta komitmen bersama (*Taking Ownership)*.

Sumber: Humas Kemensetneg

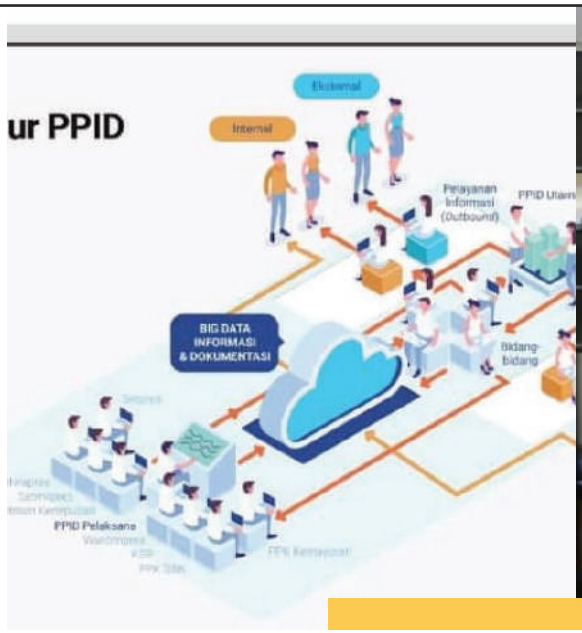

4. Rapat Koordinasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menggelar Rakor PPID secara daring. Rakor dipimpin oleh Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, selaku Pengarah/Atasan PPID Kemensetneg, pada Jumat (30/4). Rakor yang diikuti oleh Anggota PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Kemensetneg ini digelar untuk membangun komitmen bersama (*taking ownership*) dan *shared vision* guna mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemensetneg, membangun kepercayaan serta meningkatkan keterlibatan (engangement) publik untuk terus menaikkan reputasi dan jenama (*branding*) Kemensetneg.

Sumber: Humas Kemensetneg

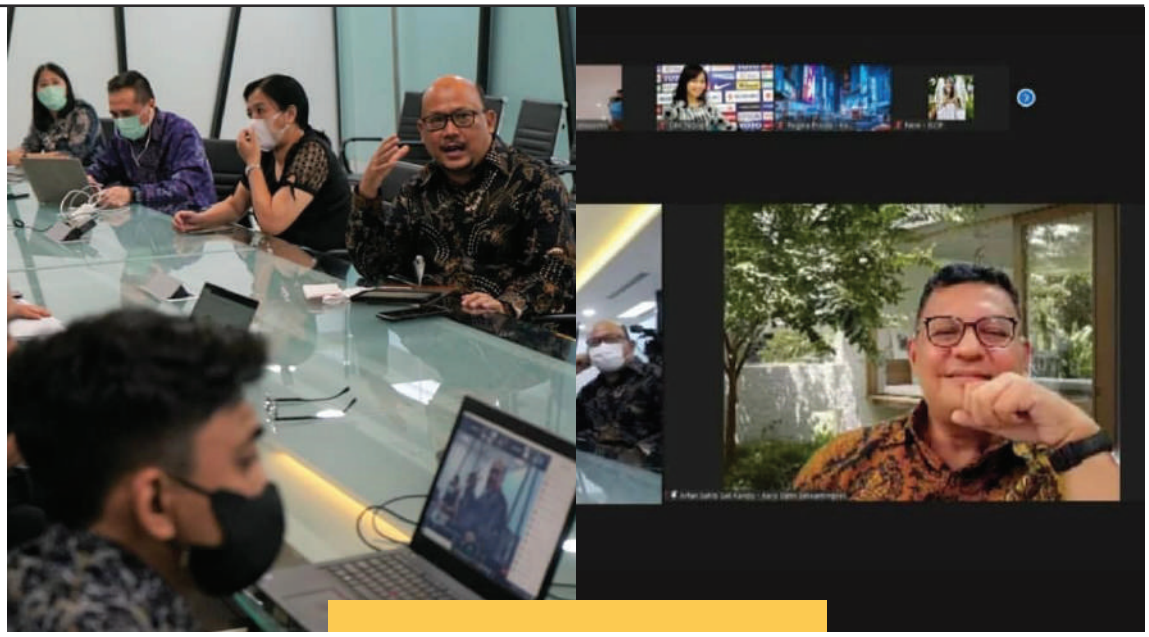

5. Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) berkolaborasi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Kamis (5/5), Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) berkolaborasi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dalam upaya mengembangkan organisasi pembelajar guna mewujudkan Layanan Kehumasan Kemensetneg yang terintegrasi menuju Dilan Proaktif (Digital Melayani, Profesional, dan Inovatif).

FGD diselenggarakan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan). Kegiatan diselenggarakan di Gedung BRI I, Jakarta, yang diikuti oleh peserta yang terdiri atas perwakilan dari satuan organisasi dan Badan Layanan Umum (BLU) Kemensetneg, dan Jajaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang

diwakili oleh Aestika Oryza Gunarto , selaku Corporate Secretary yang juga sebagai Ketua Umum Forum Humas BUMN Periode 2021-2023.

Sumber: Humas Kemensetneg

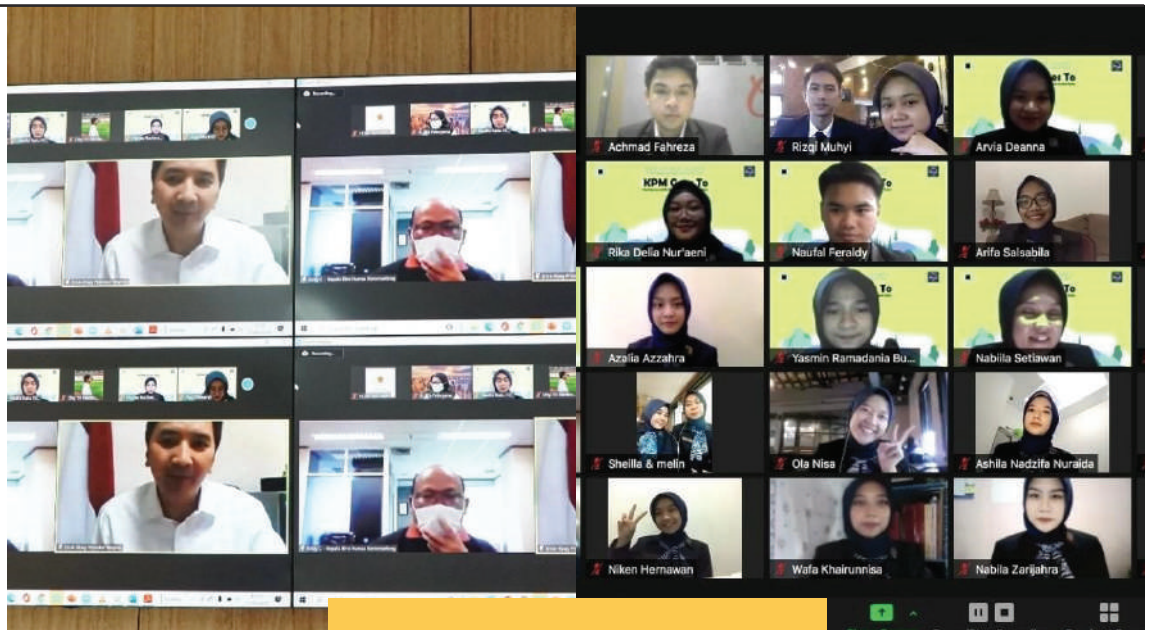

6. Kunjungan Virtual Korps Protokoler Mahasiswa (KPM) Universitas Islam Bandung (UNISBA)

Kamis (27/05), Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyelenggarakan kunjungan virtual perdana bagi lebih dari 50 mahasiswa Korps Protokoler Mahasiswa (KPM) Universitas Islam Bandung (UNISBA). Selain itu, perwakilan pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut hadir mengikuti kunjungan virtual melalui telekonferensi dari Medan.

Kegiatan kunjungan mahasiswa yang biasanya dilakukan secara tatap muka langsung kini bertransformasi menjadi

kunjungan virtual. Kunjungan virtual dengan metode *hybrid* (*blended*) learning ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjawab tantangan double disruption, yaitu karena adanya Revolusi Industri 4.0 dan pandemi Covid-19.

Acara kunjungan dibuka oleh Kepala Biro Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto dan dilanjutkan oleh sambutan dari Wakil Rektor III UNISBA, H. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si. Kunjungan ini juga menghadirkan Kepala Bagian Acara dan Persidangan Biro Protokol dan Kerumahtanggaan Setwapres, Erick Griwantara, sebagai salah satu narasumber yang mengisi terkait keprotokolan.

Sumber: Humas Kemensetneg

7. Kunjungan Kehumasan Lembaga Administrasi Negara

Dukung ASN semakin unggul, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Biro Humas Kemensetneg) menyambangi Perpustakaan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (Pusbangkom LAN), Rabu (9/6). Dalam kunjungannya, Biro Humas Kemensetneg memberikan tiga paket himpunan majalah Inovasi sebagai bentuk kolabarosi serta *sharing knowledge* antar Kementerian dan Lembaga.

Sumber: Humas Kemensetneg

8. Media Visit: Fajar Cirebon

Kamis (9/6), Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan media visit ke Harian Umum Fajar Cirebon dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya yaitu pelaksanaan monitoring

dan analisis media serta peliputan dan pendokumentasian kegiatan Kehumasan.

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Tim Biro Humas Kemensetneg disambut hangat oleh Direktur dan Pemimpin Redaksi Fajar Cirebon guna mengkolaborasikan dan mengglorifikasikan pencapaian program pemerintah serta berbagi pengalaman dalam hal pengelolaan *news room* dan penyusunan agenda setting.

Sumber: Humas Kemensetneg

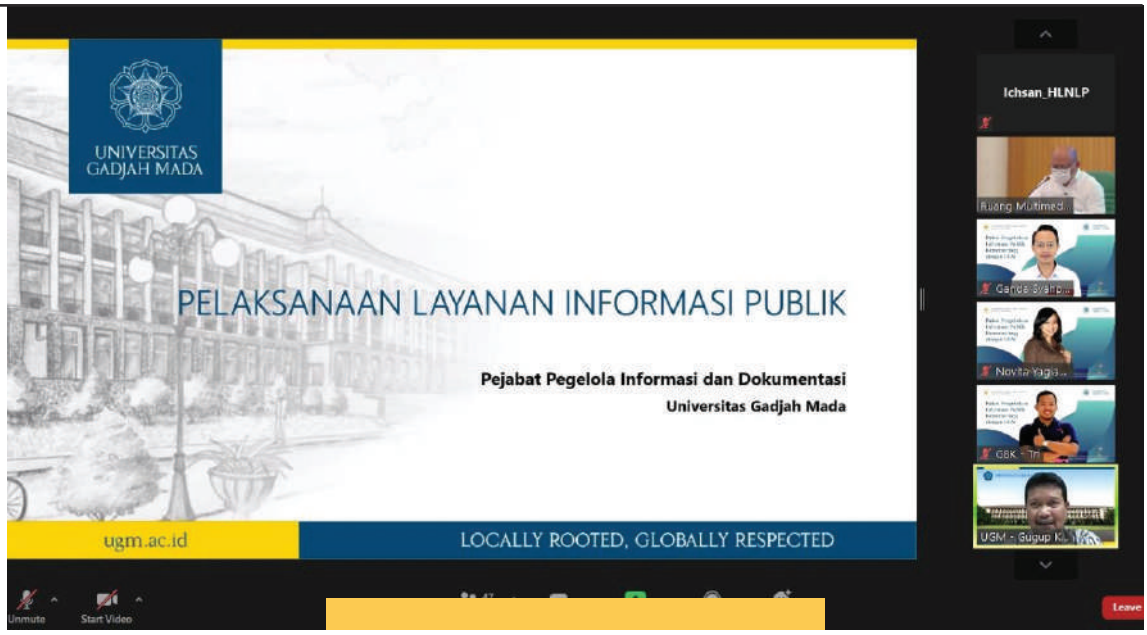

9. Rapat Koordinasi PPID dengan Universitas Gadjah Mada

Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyelenggarakan *benchmarking* terkait integrasi pengelolaan informasi publik dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Gajah

Mada selaku Badan Publik Informatif kategori Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020 pada Rabu (16/6)

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Anggota PPID di lingkungan Kemensetneg ini, dilakukan sebagai salah satu upaya pengembangan merdeka belajar dalam rangka peningkatan kapabilitas SDM agar *agile* dan adaptif terhadap perubahan, utamanya dalam inovasi pelayanan informasi dan mengakselerasi penyampaian informasi kepada publik.

Sumber: Humas Kemensetneg

10. Konvensi Nasional Pranata Humas 2021

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berpartisipasi dalam rangkaian acara Konvensi

Nasional Pranata Humas 2021 pada Selasa (31/8).

Dalam rangkaian acara yang diselenggarakan selama dua hari tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto memaparkan perihal Peluang dan Tantangan pada Era Jabatan Fungsional di era digital khususnya bagi Pranata Hubungan Masyarakat yang memiliki peran strategis sebagai garda terdepan mendiseminasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas.

Sumber: Humas Kemensetneg

11. Webinar Kehumasan

Selasa (14/9), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyelenggarakan Webinar Kehumasan bertema "Inovasi, Kolaborasi dan Transformasi Digital, Kunci

Akselerasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik" dengan narasumber Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hary Budiarto, Komisioner Bidang Kelembagaan, Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi, dan Kepala Biro Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya Kemensetneg untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), publik lebih sadar informasi, turut berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program kerja pemerintah, dan secara umum memahami keputusan pemerintah dalam persepektif informasi.

Sumber: Humas Kemensetneg

12. Audiensi Virtual Pengurus IPRAHUMAS 2022-2024

Pada Jum'at (17/9) Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara mengadakan audiensi virtual dengan pengurus pusat dan anggota Ikatan Pranata Hubungan Masyarakat Indonesia (IPRAHUMAS) secara daring.

Dalam audiensi virtual tersebut dibahas beberapa hal, salah satunya agar IPRAHUMAS diharapkan dapat terus meningkatkan perannya untuk menjadi wadah kolaborasi dan sinergi bagi para pranata humas untuk saling bertukar informasi, saling merumuskan, dan menawarkan alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan dalam pengembangan Jabatan Fungsional Humas.

Selain itu, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan komitmen IPRAHUMAS menjadi garda terdepan untuk menyampaikan kerja dan raihan positif pemerintah kepada publik, serta mendukung dan membantu Pranata Humas di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, IPRAHUMAS secara simbolik mengangkat Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg sebagai Anggota Dewan Kehormatan IPRAHUMAS periode 2022-2024.

Sumber: Humas Kemensetneg

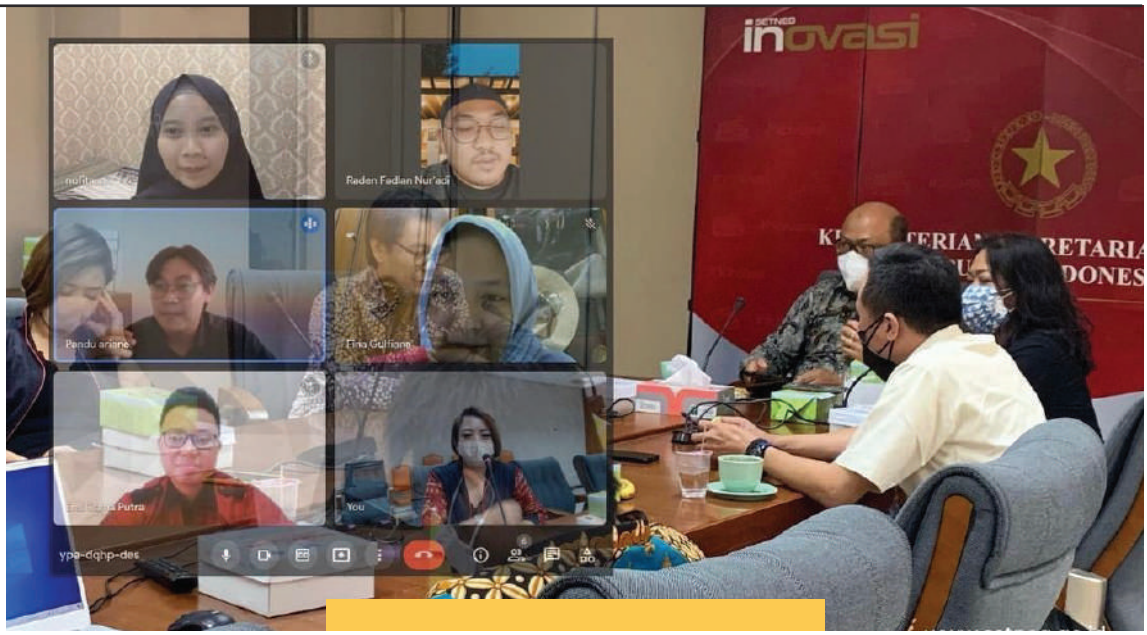

13. Audiensi Virtual Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) Muda Jakarta Raya

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) menerima audiensi virtual pengurus organisasi profesi di bidang kehumasan, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) Muda Jakarta Raya pada Jumat (22/10). Audiensi ini diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi untuk mengisi ruang publik dengan informasi-informasi positif untuk membangun optimisme Indonesia Maju.

Kemensetneg mengharapkan dan membuka kesempatan bagi PERHUMAS Muda Jakarta Raya untuk mengkonkritkan kolaborasi melalui perencanaan pertemuan lanjutan antara Kemensetneg dan PERHUMAS Muda Jakarta Raya untuk berkolaborasi dalam bidang kehumasan dan komunikasi publik, serta menawarkan

merdeka belajar kehumasan di lingkungan Kemensetneg melalui program magang.

Sumber: Humas Kemensetneg

14. Monitoring dan Evaluasi, Keterbukaan Informasi Publik

Kepala Biro Hubungan Masyarakat selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Sekretariat Negara melakukan Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai rangkaian acara Anugerah Informasi Publik 2021 yang akan diselenggarakan pada akhir Oktober, Kamis (14/10).

Pada tahapan terakhir kegiatan Monev KIP ini memberi kesempatan kepada Ketua PPID untuk memaparkan secara daring mengenai Inovasi dan Kolaborasi

Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Badan Publik dalam melakukan pelayanan Informasi Publik.

Sumber: Humas Kemensetneg

15. Kunjungan Virtual Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar (FISIP UNTIDAR)

Rabu (27/10), Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), melalui Program Setneg Mantul Virtual, menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar (FISIP UNTIDAR), Magelang, Jawa Tengah.

Dalam kunjungan virtual tersebut, Kepala Biro Humas, Eddy Cahyono Sugiarto memaparkan beragam inovasi Kemensetneg dalam paparan yang bertema "Peningkatan Kinerja dan Layanan Publik dalam Mendorong Pemerintah yang Inovatif".

Sumber: Humas Kemensetneg

16. Webinar Kehumasan bersama PERHUMAS Muda Jakarta Raya

Dari Jakarta Menuju KNH2021: Kolaborasi Mengisi Optimisme Ruang Publik "Optimisme Indonesia Maju Melalui Humas Muda".

Dilaksanakan secara luring dan daring, Jumat (26/11), Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berkolaborasi dengan @perhumasmudajktraya mengglorifikasikan "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh" dalam Webinar Kehumasan bertajuk "Dari Jakarta Menuju KNH2021: Kolaborasi Mengisi Optimisme Ruang Publik '"Optimisme Indonesia Maju Melalui Humas Muda".

Kegiatan yang dihadiri lebih dari 150 peserta ini bertujuan menglorifikasi kerja-kerja pemerintah mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh dan juga menggaungkan program Perhumas yaitu "Indonesia Bicara Baik".

Sumber: Humas Kemensetneg

17. Media Visit: BatamNews, BatamPost, Tribun Batam

Selasa (7/12), Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan kunjungan ke kantor tiga media massa di Kota Batam, BatamNews, BatamPost, dan Tribun Batam, dalam rangka menyampaikan pesan-pesan tentang transformasi digital, debirokratisasi, dan deregulasi yang mengakselerasi transformasi kerja di lingkungan Kemensetneg. Kunjungan ini juga sekaligus memperkenalkan beragam inovasi yang telah sukses diimplementasikan di lingkungan Kemensetneg.

Sumber: Humas Kemensetneg

18. Kolaborasi Kehumasan dengan ITDC Nusa Dua

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) mengadakan pertemuan dengan ITDC Nusa Dua, Bali, pada Selasa (21/12). Pertemuan ini dilakukan dalam rangka menunjukan peran strategis Indonesia dalam penyelenggaraan G20 perlu didukung oleh semua elemen masyarakat agar penyelenggaraan dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses.

Kemensetneg dan ITDC Nusa Dua sepakat menyiapkan dukungan teknis terkait dengan komunikasi publik penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022, yang akan difinalisasi lebih lanjut dalam beberapa pertemuan mendatang.

Sumber: Humas Kemensetneg

19. Kolaborasi Kehumasan dengan Badan Otorita Borobudur serta PT. Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) melaksanakan pertemuan dalam rangka menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, serta sebagai upaya meningkatkan dukungan masyarakat pada pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya pelaksanaan KTT G20 dengan Badan Otorita Borobudur (BOB) dan PT. Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko (TWC) pada 28 dan 29 Maret 2021.

Dalam kesempatan tersebut, BOB dan TWC menyampaikan berbagai persiapan dalam menyambut KTTG20 yang telah dan akan dilakukan. Kemensetneg, BOB, dan TWC pun sepakat akan melakukan kerja sama lanjutan, salah satunya dalam diseminasi informasi, sebagai upaya menyukseskan Presidensi G20 Indonesia.

Sumber: Humas Kemensetneg

20. Kolaborasi Kehumasan dengan PT. ITDC Mandalika

Dalam rangka mendukung pergelaran MotoGP 2022 serta mendiseminasikan persiapan Mandalika sebagai salah satu tuan rumah dari *side events* Presidensi G20, Biro Humas, Kementerian Sekretariat Negara mengunjuki kantor PT ITDC Mandalika.

Dalam pertemuan ini, Kemensetneg dan PT ITDC Mandalika memiliki satu komitmen bahwa acara internasional yang diadakan di Indonesia patut mendapatkan dukungan dan apresiasi, utamanya dalam rangka mengakselerasi peningkatan ekonomi Indonesia di masa pandemi.

Sumber: Humas Kemensetneg

BAB 3

KOMUNIKASI PUBLIK DAN DISEMINASI INFORMASI

: Rendy Novantino pada Unsplash.com

UNJUK RASA

: Antaranews.com

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia telah mengatur dan menegaskan bahwa Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara, namun dengan batasan-batasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan menurut konstitusi bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang bertanggungjawab dengan memperhatikan hak-hak orang lain di sekitar.

Salah satu kebebasan yang dikelola oleh UUD 1945 adalah kebebasan untuk dapat menyampaikan aspirasi di muka umum atau yang sering disebut sebagai unjuk rasa. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 yang menyebutkan “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Untuk itu, proses penyampaian pendapat oleh setiap elemen masyarakat tentu juga harus dasari oleh hukum dan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 9 memberikan bentuk-bentuk dan tata cara

menyampaikan pendapat di muka umum. Terdapat empat bentuk penyampaian pendapat yang diatur dalam undang-undang, antara lain unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 9 memberikan bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Terdapat empat bentuk penyampaian pendapat yang diatur dalam undang-undang, antara lain unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas.

A.	Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
B.	Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.
C.	Pemberitahuan memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.
D.	Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.
E.	Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib: a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute

F. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

Selain tata cara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur soal pelanggaran di saat pelaksanaan penyampaian aspirasi di muka umum serta sanksi yang menjerat pelaku. Hal ini tentu menegaskan bahwa kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi menjadi nilai yang penting bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia sehingga perlu dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa "pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikenakan apabila terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian."

Untuk menghindari pelanggaran tersebut, para peserta atau pelaksana penyampaian pendapat perlu memahami landasan penyampaian dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998, yakni:

A. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
B. Asas musyawarah dan mufakat
C. Asas kepastian hukum dan keadilan
D. Asas proporsionalitas
E. Asas manfaat

Kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia juga turut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menerangkan mengenai tata cara, mekanisme, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan penyampaian pendapat kepada instansi atau pihak tertentu, seperti kepada Kementerian atau Presiden.

Peraturan itu menjadikan Lingkungan Lembaga Kepresidenan sebagai sebuah tempat yang bernilai strategis dalam menyuarakan aspirasi dan pendapat masyarakat sekaligus menjadi tempat yang paling dilindungi karena didalamnya menyangkut harkat dan martabat seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. Pada beberapa kesempatan, masyarakat diperkenankan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi keluh kesah dari masyarakat.

Dalam hal penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum secara langsung kepada Presiden, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagai filter pertama setiap aspirasi atau pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Pasal 3 Poin E tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Di dalam peraturan tersebut, Kementerian Sekretariat Negara mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri. Selanjutnya, Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi garda terdepan yang menjamin pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum, khususnya di Lingkungan Istana Kepresidenan, berlangsung tertib, responsif, dan kondusif.

4

Kementerian Sekretariat Negara, mengenai penyampaian pendapat di muka umum, berpedoman pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara. Pasal 320 s.d. Pasal 329 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara. Di dalam peraturan tersebut, Biro Hubungan Masyarakat menjadi pemegang mandat sebagai salah satu unit kerja yang menangani aksi penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa di lingkungan Lembaga Kepresidenan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Asisten Deputi Hubungan Lembaga Non Pemerintah, Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, dan Asisten Deputi Bidang Hukum, dalam melakukan penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum dan unjuk rasa.

2021 masih menjadi tahun yang cukup berat bagi Indonesia karena di tahun ini, Indonesia masih berada di bayang-bayang pandemi covid-19. Sama seperti tahun 2020, perubahan dalam proses penyampaian aspirasi tetap dilakukan. Penyampaian pendapat kini lebih diutamakan menggunakan media daring dengan cara dan biaya yang lebih mudah dan murah, selain itu tetap menjaga keamanan masing-masing individu. Selain itu, angka kunjungan ke Kementerian Sekretariat Negara juga ikut menurun seiring ditetapkannya pengaturan ketat mengenai kunjungan ke Kementerian Sekretariat Negara. Biar begitu, koordinasi kehumasan tetap dapat dilakukan secara efektif dan efisien, walaupun dilakukan lebih banyak melalui media daring. Secara total, terdapat 452 aksi unjuk rasa yang dilakukan di lingkungan Kepresidenan, beberapa diantaranya adalah:

: Kementerian Sekretariat Negara

: detik.com

1. Aksi Unjuk Rasa Terhadap Omnibus Law

Aksi unjuk rasa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/ KSPI (FSPMI, FSP KEP, SPN, Aspek Indonesia, FSP Farkes Ref, FSP PPMI, FSP ISI, FSP Pariwisata Ref, Honorer) pada tanggal 22 April 2021 yang menyampaikan aspirasi mengenai pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena dianggap tidak sejalan dengan aspirasi buruh dan pekerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/ KSPI (FSPMI, FSP KEP, SPN, Aspek Indonesia, FSP Farkes Ref, FSP PPMI, FSP ISI, FSP Pariwisata Ref, Honorer) dimasukkan dalam kode masalah Tata Laksana/Regulasi.

Dalam penanganan aksi ini, Biro Hubungan Masyarakat berkoordinasi dengan Kepolisian RI untuk memantau dan memperoleh informasi terkini mengenai jalannya aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. Aksi berlangsung aman dan tertib.

2. Aksi Unjuk Rasa Hari Buruh Internasional (May Day)

Aksi unjuk rasa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI (FSPMI, FSP KEP, SPN, Aspek Indonesia, FSP Farkes Ref, FSP PPMI, FSP ISI, FSP Pariwisata Ref, Honorer), Federasi Serikat Buruh Militan, Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (DP F-SEDAR), Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Badan Pekerja Nasional Kesatuan Perjuangan Rakyat, DPP Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Gerakan Buruh Untuk Rakyat (GEBRAK), dan Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), pada tanggal 1 Mei 2021 2021 yang menyampaikan aspirasi mengenai pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena dianggap tidak sejalan dengan aspirasi buruh dan pekerja serta aksi dukungan untuk mengusut kasus korupsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI (FSPMI, FSP KEP, SPN, Aspek Indonesia, FSP Farkes Ref, FSP PPMI, FSP ISI, FSP Pariwisata Ref, Honorer), Federasi Serikat Buruh Militan, Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (DP F-SEDAR), Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Badan Pekerja Nasional Kesatuan Perjuangan Rakyat, DPP Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Gerakan Buruh Untuk Rakyat (GEBRAK), dan Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) dimasukkan dalam kode masalah Tata Laksana/Regulasi.

Dalam penanganan aksi ini, Biro Hubungan Masyarakat meninjau langsung ke lokasi dengan berkoordinasi bersama Kepolisian RI. Aksi terpantau aman dan tertib.

: liputan6.com

3. Hari Lingkungan Hidup

Tanggal 7 Juni 2022, Aksi unjuk rasa dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebagai bagian dari peringatan Hari Lingkungan Sedunia serta menyuarakan lingkungan yang baik, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi masa depan kepada Pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa ini dapat dikategorikan ke dalam kode masalah Tata Laksana/Regulasi.

Dalam penanganan aksi ini, Biro Hubungan Masyarakat tidak melakukan pantauan langsung, namun tetap berkoordinasi dengan Kepolisian RI. Aksi terpantau aman dan tertib.

4. Pekerja Tembakau

Tanggal 13 Oktober 2021, Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tembakau, Makanan, dan Minuman (PP FSP RTMM SPSI) melakukan audiensi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Pada kesempatan ini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini turut hadir dalam kegiatan audiensi ini. Pada kegiatan ini, massa aksi menyampikan permohonan agar pemerintah melakukan pertimbangkan kembali pada kenaikan harga cukai industri hasil dalam kegiatan audiensi ini. Pada kegiatan ini, massa aksi menyampikan permohonan agar pemerintah melakukan pertimbangkan kembali pada kenaikan harga cukai industri hasil tembakau.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa ini dapat dikategorikan ke dalam kode masalah Tata Laksana/Regulasi.

Dalam penanganan aksi ini, Biro Hubungan Masyarakat melakukan audiensi dengan massa aksi. Aksi terpantau aman dan tertib.

5. Reuni 212

Tanggal 2 Desember 2021, Reuni 212 diselenggarakan di sekitar Monumen Nasional. Aksi ini dilakukan untuk menggalang persaudaraan dan perdamaian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa ini dapat dikategorikan ke dalam kode masalah Umum.

DISEMINASI INFORMASI

Geliat dunia digital yang semakin masif dan meluas ke seluruh kalangan membuat Kementerian Sekretariat Negara perlu dengan cepat berpindah dari manual ke digital, utamanya dalam proses diseminasi program-program Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara. Tak hanya menunjukkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara juga *agile* terhadap perubahan dunia, penggunaan platform digital memberikan tantangan serta peluang bagi Kementerian Sekretariat Negara untuk dapat mendiseminasikan langkah dan program pemerintah secara cepat, tepat, masif, dan terukur. Pengukuran yang terdapat pada platform digital dapat digunakan oleh Kemensetneg sebagai dasar pengukuran dan metode komunikasi yang baik kepada masyarakat.

Guna memaksimalkan penggunaan platform digital dan mengoptimalkan upaya diseminasi informasi, Kementerian Sekretariat Negara membangun *website* www.setneg.go.id serta pemanfaatan sosial media, antara lain Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube. Pemilihan media sosial tersebut didasari dari tingkat keaktifan warga Indonesia menggunakan platfom tersebut. Perlahan tapi pasti, Kemensetneg mencoba menggandeng fitur maupun platform media lain, seperti pembuatan TikTok.

Laporan Kinerja Website dan Media Sosial

Untuk mendukung efektifnya proses diseminasi program pemerintah, Kementerian Sekretariat Negara melakukan evaluasi yang berasal dari data-data pengguna yang berada di platform media Kemensetneg. Upaya ini dilakukan dengan memonitor jumlah pengunjung website setiap harinya ataupun jumlah interaksi di media sosial pada konten-konten yang disajikan oleh Kemensetneg. Tentunya, Kemensetneg mencoba menyesuaikan dengan demografi dari pengguna yang terdapat pada *website* maupun media sosial Kemensetneg.

Selain itu, guna meningkatkan kapasitas dari adminstrator *website* dan media sosial Kemensetneg, pejabat/pegawai Kemensetneg, khususnya di Biro Humas, membekali diri dengan berbagai seminar dan kelas yang bekerja sama dengan banyak pihak, salah satunya Facebook Indonesia. *Insight-insight* yang disajikan oleh Facebook Indonesia tentunya menjadi catatan berharga bagi Kemensetneg dalam membangun *trust* dan *branding* di media sosial. *Branding* Kemensetneg yang baik tentunya menjadi sebuah privilese bagi Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara yang setiap detil pekerjaannya menjadi tugas dan fungsi dari Kemensetneg.

Audience Overview
Website 2021

- Pengguna: 568.819
- Pengguna Baru: 549.439
- Jumlah sesi per pengguna: 1,26
- Tayangan halaman: 1.172.933
- Halaman/sesi: 1,63
- Durasi sesi rata-rata: 00:01:21
- Rasio Pantulan: 73,27%

Data per 1 Januari
Sumber: Google Analytic

Behaviour Overview 2021

LIMA HALAMAN/KONTEN TERPOPULER

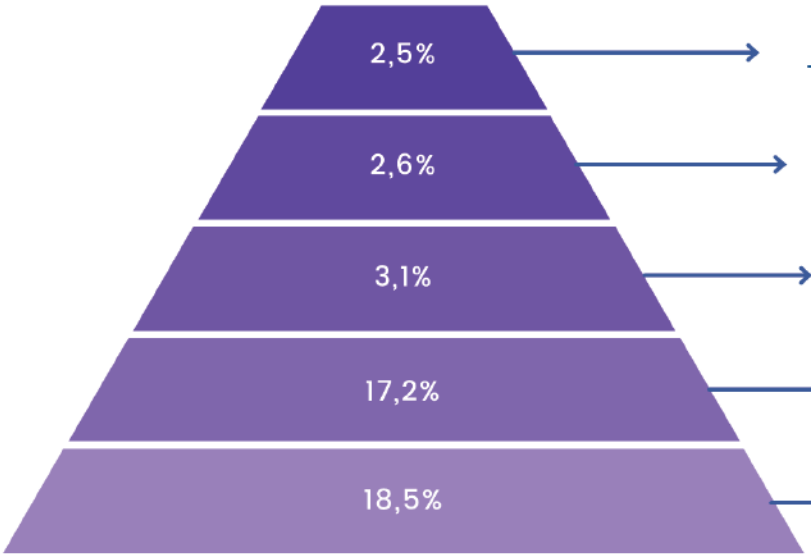

- LIST BERITA PRESIDEN & PEMERINTAH
- UU RI NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

HALAMAN ARTIKEL PEMBANGUNAN SDM MENUJU INDONESIA UNGGUL

HALAMAN ARTIKEL EKONOMI KREATIF MASA DEPAN INDONESIA

HALAMAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN KE-76 RI TAHUN 2021

BERANDA

Sumber: Google Analytics

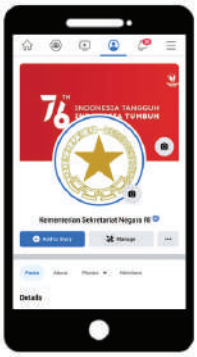

Facebook
Kementerian Sekretariat Negara

- Bergabung: 9 Oktober 2015
- Verifikasi: 12 November 2015
- Followers (Pengikut): 261K+
- Impressions/reached 30 hari terakhir: 40.760

Sumber: Page Insight Facebook

Twitter
@KemensetnegRI

- Bergabung: 18 September 2015
- Verifikasi: 23 September 2015
- Followers (Pengikut): 605K+
- Impressions 30 hari terakhir: 517.000

Sumber: Twitter Analytics

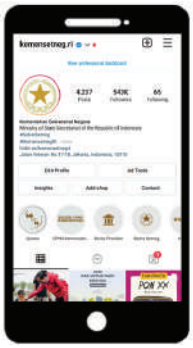

Instagram
@kemensetneg.ri

- Bergabung: 7 Agustus 2017
- Verifikasi: 8 Agustus 2017
- Followers (Pengikut): 560K+
- Impressions 30 hari terakhir: 982.065

Sumber: Insight Instagram

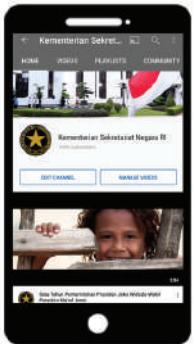

Youtube
Kementerian Sekretariat Negara

- Bergabung: 18 September 2015
- Verifikasi: 23 September 2015
- Followers (Pengikut): 171K+
- Impressions 30 hari terakhir: 4.255.336

Sumber: Youtube Analytics

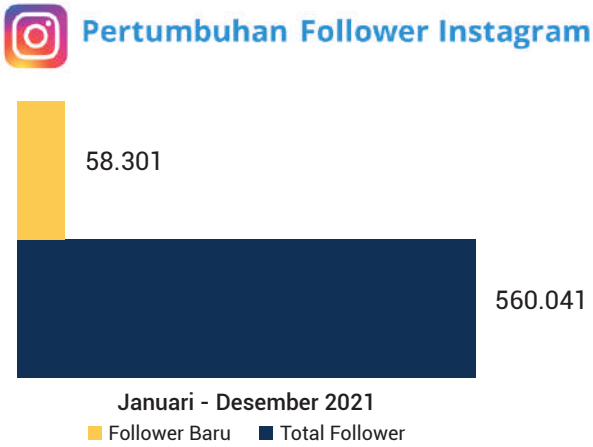

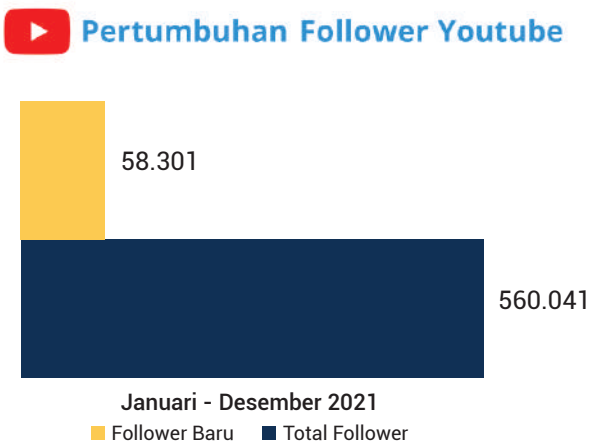

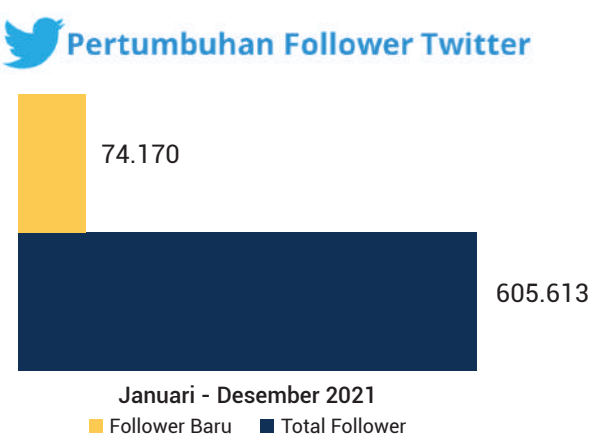

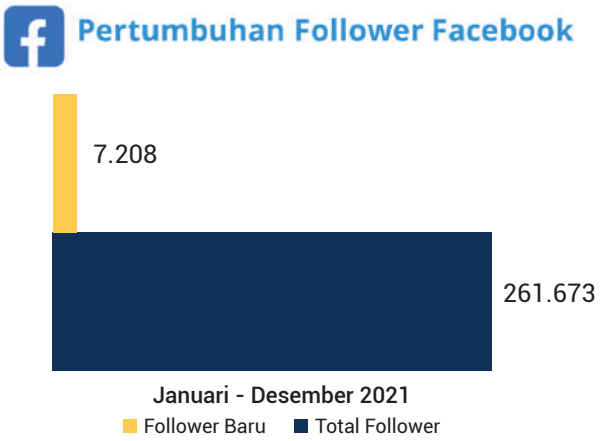

Sumber: Intelligence Media Management (IMM)

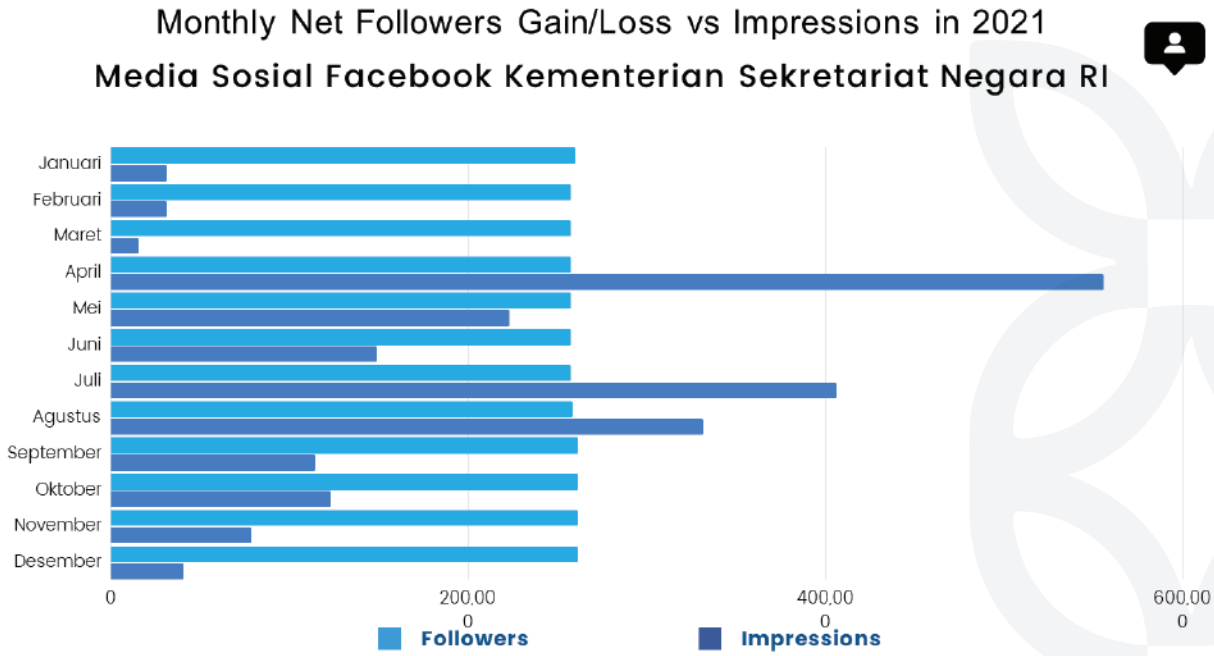

Sumber: Page Insight Facebook

: Humas Kemensetneg

Survei Kepuasan Penerimaan Kunjungan Masyarakat

Capaian *outcome* untuk indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara dari target indeks pelayanan 4,0 skala 6, telah terealisasi sebesar 5,47 skala 6.

Hasil tersebut menggambarkan meningkatnya layanan informasi publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat dalam memberikan layanan

informasi kepada kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi tentang Kementerian Sekretariat Negara baik secara materi yang diberikan maupun layanan secara umum.

Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara tahun 2021 memiliki 6 (enam) komponen penilaian dan diukur menggunakan skala Likert (1 s.d. 6) dengan urutan 1= tidak memuaskan; 2= tidak memuaskan; 3= kurang memuaskan; 4= cukup memuaskan; 5= memuaskan; dan 6= sangat memuaskan.

: Humas Kemensetneg

: Humas Kemensetneg

Pelaksanaan kegiatan survei dilaksanakan melalui pengukuran penilaian pelayan publik terhadap penyataan sebagai berikut.

A. Pertanyaan dalam bentuk Skala

1. Kemudahan prosedur layanan publik yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

2. Kecepatan layanan publik yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

3. Ketepatan penyelesaian layanan publik terhadap janji waktu pelayanan yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

4. Manfaat dari kegiatan layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

5. Penguasaan dan kemampuan penyajian materi/informasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Kedisiplinan petugas dalam memberikan layanan publik
Tanggung jawab petugas dalam memberikan layanan publik
Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan layanan publik
Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan publik
Tingkat kenyamanan pada lokasi kegiatan layanan publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
Kondisi fasilitas yang digunakan dalam kegiatan layanan publik (ruangan auditorium, lobby, ruang ibadah, toilet, dan fasilitas bagi difabel)
Kondisi utilitas pada lokasi kegiatan layanan publik (air, pendingin ruangan, listrik, penerangan, jaringan internet, lift/elevator, dan alat pendukung K3).

B. Pertanyaan Ya/Tidak

1. Apakah ada pungutan atas layanan publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara RI

C. Pertanyaan Isian

1. Informasi/layanan publik lain terkait dengan Kementerian Sekretariat Negara, yang dibutuhkan.

2. Berikan kritik/saran Anda guna perbaikan layanan publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara RI.

Pada tahun 2021 dilaksanakan penilaian terhadap layanan publik yang diselenggarakan dalam menerima 2 (dua) kunjungan perwakilan masyarakat dari perguruan tinggi, sekolah, dan instansi pemerintah ke Kementerian Sekretariat Negara, yaitu:

1. Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2. Korps Protokoler Mahasiswa (KPM) Universitas Islam Bandung (UNISBA)
3. Pengurus IPRAHUMAS 2022-2024
4. Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) Muda Jakarta Raya
5. Perhumas Muda Jakarta Raya

Dari keseluruhan kegiatan penerimaan delegasi tahun 2021, Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan nilai 5,47 dari nilai keseluruhan 6. Nilai ini diambil dari nilai rata-rata yang didapat pada tiap indikator. Nilai tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi dan benchmark bagi Kementerian Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan kegiatan penerimaan delegasi masyarakat untuk terus mengemban dan meningkatkan layanan informasi kepada publik.. Selain itu, nilai tersebut menjadi komitmen Kementerian Sekretariat Negara dalam menjadi saluran aspirasi masyarakat yang akan ditujukan pada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretariat Negara.

: prananta haroun pada Unsplash.com

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sekretariat Negara
Copyright @2021